

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL DI KABUPATEN ENREKANG
(studi kasus badan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Enrekang)**

SKRIPSI

Oleh
IRWAN
10573 05140 14



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL DI KABUPATEN ENREKANG
(studi kasus badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Enrekang)

OLEH

IRWAN

10573 05140 14

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2019

PERSEMBAHAN

Karyah ilmiahini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Radeng dan Ibunda Pette, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena tiada do,a yang paling khusyu, selain dari kedua orang tua serta saudara dan sepupu saya yang selalu memberi arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak dan Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat – sahabat yang selalu memberi bantuan dan memberi semangat beserta dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa menghadapi masalah, tantangan dan hambatan secara mandiri. Jangan takut untuk melangkah tapi takutlah anda berdiam di tempat.

“maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Abdulin No.209 Gedung Ikm Lt. 7 Tel. (0411) 662872 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual di Kabupaten Enrekang (studi kasus badan
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang)
Nama Mahasiswa : IRWAN
No Stambuk/NIM : 20573 05140 14
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 September 2019 di Ruang
IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 September 2019

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aguswalin HR, SE, MM
NIDN: 0911115703

Linda Arisanty Razak, SE, M.Si, Ak.CA
NIDN: 092008702

Mengesahul :

Program Studi Akuntansi

Dr. Nurrahmatul Kholiqi, SE, M.Si, Ak.CA, CSP
NBN: 11113-201



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Ibra Lt. 7 Tel.(0411) 885972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **IRWAN** NIM : **10573 05140 14**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145/ Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar 15 Muharram 1441 H
15 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Ketua : Ismail Resulung, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguj :
 1. Dr. Andi Rustam, SE.,MM,AK.,CA.,CPA
 2. Linda Ansanty Razak.,SE.,M.Si,AK.,CA.
 3. Abd. Salam HB.,SE.,M.Si,AK.,CA.,CSP
 4. Samsul Rizal.,SE.,MM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Abdulkadris No. 289, Gedung Ikm Lt. 7, Tel. (0411) 692872 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang berkepentingan dengan pernyataan ini :

Nama : IRWAN
Stambuk : 10573 05140 14
Jurusan : Akuntansi

Dengan judul: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akual di
Kabupaten Enrekang (studi kasus badan pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Enrekang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Desember 2019

Saya Membuat Pernyataan

IRWAN

Diketahui Oleh

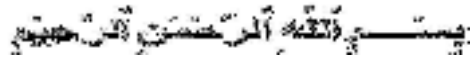
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollah, SE, MM
NBM. 083076

Dr. Ismail Badollah, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM. 1073428

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus pada BPKD Kabupaten Enrekang)” dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang diharapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini disusun untuk memberikan sumbangsi terhadap pengembangan penelitian, khususnya bidang akuntansi sektor publik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap agar karya ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya. Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan, tidak terkecuali Keluarga tercinta, terutama kedua orang tuaku, Ayahanda Radeng dan Ibu Pette serta saudara-saudaraku, atas segala curahan doa, motivasi dan dukungan sehingga penulis sampai pada titik ini, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.Ca selaku Ketua Jurusan beserta seluruh dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr.AgussalimHarrang,SE.,MM dan Linda Arisanty Razak,SE.,M.si.ak.ca Selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu penulis dalam menimbah ilmu dan memperluas wawasan selama penulis mengikuti pendidikan di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Terima kasih telah memberikan data, informasi, dan bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian lapangan.
8. Teman-teman dari jurusan akuntansi terutama angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda tawanya, keakraban, persaudaraan, dukungan serta motivasi dan pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Wassalam.

Makassar, 2019



ABSTRAK

IRWAN,2019. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Di Kabupaten Enrekang Studi Kasus Pada Kantor Bpkd Kabupaten Enrekang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Agussalim HR. SE.,MM dan Pembimbing II Linda ArisantyRazak,SE.,M.Si.AK.CA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Enrekang Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang dalam aspek kualitas pelaporan. Manfaat penelitian yaitu manfaat teori dan manfaat praktik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan dikantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang telah antusias mengimplementasikan standar akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan sebagaimana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem tersebut.

Kata kunci: *Implementasi, Standar Akuntansi, Akrual Basis, Kualitas Pelaporan.*

ABSTRACT

IRWAN, 2018. *Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Enrekang Regency Case Study at Enrekang Regency BPKD Office. Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Dr. Agussalim HR. SE., MM and Advisor II Linda Arisanty Razak, SE., M.Sc.AK.CA*

This study aims to find out how much the implementation of accrual-based Government accounting standards in Enrekang District Case study on the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Enrekang Regency. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of accrual-based government accounting standards in the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Enrekang Regency in terms of reporting quality aspects. The benefits of research are the benefits of theory and the benefits of practice.

This type of research is qualitative research Data sources used in this study are secondary data and primary data. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis. Methods of collecting data using interview techniques and documentation.

The results of the study showed that the quality of reporting at the Enrekang Regency Regional Financial Management Agency (BPKD) office was in accordance with the rules set by the government. This is supported by the fact that the Enrekang District Financial Management Agency (BPKD) has enthusiastically implemented accrual-based accounting standards in improving the quality of government reporting as researchers have in the field and supported by the details of the budget that has been utilized to use the system.

Keywords: Implementation, Accounting Standards, Base Accruals, Reporting Quality.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACKTBAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	

A. Standar Akuntansi Pemerintah.....	8
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah	8
2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010	10
B. Akuntansi Berbasis Akrual	11
1. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual	17
2. Kendala Penerapan Basis Akrual	18
3. Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual	19
4. Kesiapan Pemda dalam penerapan SAP Berbasis Akrual ...	21
C. Implementasi SAP Berbasis Akrual di Pemerintahan	23
D. Penelitian Terdahulu	27
E. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Pengumpulan Data.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum dan lokasi penelitian	37
1. Sejarah Singkat BPKD Kabupaten Enrekang	37
2. Visi dan Misi BPKD.....	39
3. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang	39

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Pada BPKD	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
1. Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Enrekang.....	45
2. Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Antara Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual	50
3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2018	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

5.1 Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Antara Basis Kas Menuju Akrua dan Basis Akrua.....	51
5.2 Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2018.....	56
5.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2018.....	58



DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat balasan dari Kantor BPKD Kabupaten Enrekang
2. Daftar Wawancara pada kepala dinas BPKD Kabupaten Enrekang
3. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bagian dari reformasi keuangan Negara adalah dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, PP No 71 tahun 2010 mengamanatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh harus di terapkan pada tahun anggaran 2015. Pada tahun 2015 adalah tahun yang sangat krusial dalam bidang keuangan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tidak terkecuali pada seluruh pemerintah sulawesi selatan. Hal tersebut adalah karena pada tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi pada pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah sulawesi selatan, dari yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual (akrual basis), dan kemudian Permendagri No 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana amanat dari undang-undang nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, bahwa setiap entitas akuntansi pada pemerintah pusat harus menerapkan basis akrual untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, hal ini semua pengelolaan keuangan pada satuan kerja pemerintah pusat harus mampu daerah untuk menerapkan basis akrual. Dalam menyikapi hal tersebut

Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang harus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi agar mampu beradaptasi dan menjalankan dengan perubahan tersebut, mampu menjalankan tugas secara profesional, memegang teguh etika birokrasi dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka memberikan informasi yang benar, baik kepada atasan maupun kepada masyarakat Kabupaten Enrekang.

Akhir-akhir ini, organisasi sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tata kelola pemerintah merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan efisien. Lemahnya tata kelola pemerintah yang baik di instansi pemerintahan ditandai dengan tidak efektifnya organisasi dan birokrasi, rendahnya kualitas pelayanan terhadap publik, sulitnya pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Good Governance* pada sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Enrekang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) terus melakukan pengevaluasian terhadap sumber daya dalam pemerintahannya agar lebih efektif dan efisien

dalam pelaporannya. Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Enrekang harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja tinggi agar menghasilkan laporan yang akurat dan terpercaya. Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya dan tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai jika kinerja karyawannya baik.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama SDM Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Enrekang. Seorang PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang ditandai dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan

bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN, mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang lebih populer dengan istilah "*Good Governance*". Salah satu masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang besar apa bila dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Persoalan yang ada adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan dapat tercapai.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang ingin memiliki sumber daya manusia (SDM) yang professional dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, organisasi pemerintahan dapat melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan bagi sumber daya manusianya. beberapa alasan utama perlunya pengembangan sumber daya manusia(SDM), yakni: 1) adanya pegawai baru yang tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugasnya; 2) pengetahuan pegawai yang perlu pemuktahiran; 3) perubahan, tidak hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga karena pergeseran nilai-nilai sosial budaya; dan 4) kemungkinan perpindahan pegawai. Hanya saja untuk

menghasilkan prestasi kerja yang tinggi seorang karyawan tidak saja perlu memiliki keterampilan, tetapi ia juga memiliki keinginan dan semangat untuk berprestasi tinggi. Maka upaya-upaya organisasi dalam mendorong pegawainya untuk bekerja lebih baik harus terus dilakukan termasuk di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang, dengan adanya pegawai yang bekerja secara baik ini, maka di harapkan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa dengan di keluarkannya peraturan pemerintah tentang akuntansi berbasis akrual maka akan menghasilkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian tersebut antara lain, Sony Lamonsi (2016) dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kota Tomohon mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik meneliti tentang "IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL DI KABUPATEN ENREKANG (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang dalam aspek kualitas pelaporan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang dalam aspek kualitas pelaporan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum

juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Secara umum basis kas pada akuntansi telah lama ditinggalkan oleh para peyelenggara laporan akuntansi dan telah beralih ke basis akrual.

Budiono (2016), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan

auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Mahsun (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tanjung (2013) Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Peraturan menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 basis akuntansi kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas di terima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan di akui pada saat kas di terima di rekening kas umum Negara / daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas di keluarkan dari rekening kas umum Negara / Daerah atau entitas pelaporan.

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas serta dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010

dimaksud dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah peraturan yang berisi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mengatur tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun Laporan 15 Keuangan Pemerintah. Dapat

dikatakan juga peraturan tersebut merupakan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan pemerintah yakni basis akrual, sehingga dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan entitas Pelaporan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Entitas Pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran (Firdaus, 2015).

Acuan KSAP sebagai penyusun standar Laporan Keuangan pemerintah, pemerintah dan pengguna Laporan Keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah No 71/2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP 24/2005) pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Lampiran III PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Firdaus, 2015).

B. Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, di catat, dan di sajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi

tersebut. Tanpa memperhatikan waktu kas di terima atau di bayarkan. dengan kata lain, basis akrual di gunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana.

Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practiced* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar berikut ini:

a. Pengakuan Pendapatan

Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengalihan dari hasil kegiatan pemerintah dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar benar di terima menjadi hal yang kurang penting. Sebab penghasilan sudah diakui pada hal belum di terima

b. Pengakuan beban

Pengakuan beban di lakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi maka titik ini dapat di anggap sebagai *starting point* munculnya biaya, meskipun beban tersebut belum di bayar.

Laughlin (2012) mendefinisikan akuntansi akrual adalah metode pencatatan transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas yang diterima atau dibayarkan dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan, yang akan diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan seharusnya dicatat.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga yang menyatakan bahwa, apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis akrual, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terdapat 7 komponen laporan keuangan pokok yang harus dilaporkan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Masing-masing laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu, sehingga tersaji sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan dengan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Saldo Anggaran Lebih Akhir;

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dari uraian di atas, perbedaan yang paling mendasar dari komponen laporan keuangan antara PP No 64 tahun 2005 dengan PP no 71 tahun 2010 terletak pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Operasional. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebenarnya bukan hal yang baru, sebab laporan ini, dulunya (ketika akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis kas) merupakan bagian dari laporan surplus / defisit. Namun dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan neraca dan laporan operasional menggunakan basis akrual (Hafiz Tanjung, 2013). Begitu juga yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, tujuan penerapan

basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan.

1. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual

Pada penyusunan dan penerapannya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memang cukup memberi dilema tersendiri bahkan banyak tekanan dan tantangan yang terjadi. Namun demikian, akuntansi berbasis akrual di suatu organisasi pemerintahan memiliki beberapa manfaat yang diperoleh, yakni;

1. Sebagai bentuk pelaksanaan konsep pusat pertanggungjawaban.
2. Sebagai suatu peluang untuk menerapkan prinsip *cost againsts revenue*.
3. Sebagai suatu fondasi untuk melakukan perhitungan biaya produk atau pelayanan yang lebih baik.
4. Sebagai suatu sarana penghitungan nilai subsidi yang lebih baik atas setiap produk dan/atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
5. Sebagai suatu bentuk analisis keekonomisan dan keefisienan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik.
6. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja organisasi pemerintah.

7. Sebagai upaya meningkatkan kualitas standar analisis biaya bukan lagi hanya sekedar standar analisis belanja.
8. Sebagai suatu bantuan penerapan pendekatan anggaran kinerja (*performance budget*) dan *medium term expenditure framework* (MTEF) dalam penganggaran.

2. Kendala Penerapan Basis Akrua

Untuk konteks di Indonesia Ritonga (2013) mengatakan bahwa untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung, sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan SDM yang berkompeten dan professional dalam pengelolaan keuangan.
- b. Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Perubahan-perubahan yang terjadi harus melalui pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, proses baku penyusunan di dalam penyusunan suatu standar akuntansi, termasuk untuk menerapkan basis akuntansi, harus dilaksanakan dengan baik dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, agar standar yang dihasilkan lebih berkualitas
- c. Tersedianya system teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
- d. Adanya system penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih basis kas sedangkan

realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat dibandingkan.

- e. Dari kendala-kendala diatas memunculkan persyaratan, yaitu harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan basis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang panjang.

Bastian menambahkan, beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
- b. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
- c. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
- d. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

3. Strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah BerbasisAkrual

Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia (2014) mengatakan bahwa dalam

menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah memiliki peluang antara lain sebagai berikut:

- a. Amanat UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 serta rekomendasi BPK dalam penerapan akuntansi berbasis akrual;
- b. Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaraan negara;
- c. Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual;
- d. Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP);
- e. Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual;
- f. Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh kementerian negara/lembaga;
- h. Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan rewiw dan pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- i. Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif;
- j. Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia.

4. Kesiapan Pemda dalam Penerapan SAP Berbasis Akruai

Kesiapan sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. kesiapan adalah sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi, proses, konteks, dan individu, secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status *quo*. Adapun kesiapan penerapan SAP berbasis akruai bisa dilihat dari aspek berikut ini:

a. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan organisasi. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuand ari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan.

b. Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-

instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

c. Teknologi informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar.

c. Komitmen Organisasi

komitmen organisasi sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Komitmen yang tinggi dari aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

d. Kebijakan Akuntansi

Pengertian kebijakan akuntansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (6) adalah

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah terdiri dari kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

C. Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintahan

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrua dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. SAP Berbasis Akrua diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi SAP Berbasis Akrua harus disertai dengan upaya sinkronisasi berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP Berbasis Akrua. Keterbatasan dari penerapan SAP Berbasis Akrua dinyatakan secara eksplisit pada setiap PSAP yang diterbitkan.

Akuntansi berbasis akrua sangat penting dalam akuntansi karena menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih akan menentukan jenis pelaporan, terutama bentuk laporan, karena akan mempengaruhi informasi maupun unsur yang akan dilaporkan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi susunan standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.

Implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan mempedomani lampiran I PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP Dimensi yang digunakan adalah

1. Dimensi pengakuan pendapatan yang diukur diukur berdasarkan pengakuan pendapatan pada Laporan Operasional dan pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
2. Dimensi pengakuan beban dan belanja yang diukur berdasarkan pengakuan beban dan pengakuan belanja.
3. Dimensi akuntansi persediaan yang diukur dengan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan.
4. Dimensi akuntansi aset tetap yang diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan serta depresiasi.
5. Dimensi akuntansi kewajiban yang ini diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban.
6. Dimensi laporan operasional yang diukur dengan penyajian laporan operasional.
7. Dimensi laporan perubahan ekuitas yang diukur dengan penyajian laporan perubahan ekuitas.

Tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual salah satunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan. Keberhasilan implementasi SAP pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya yaitu sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan

pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut. Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para pengelola dari sisi keluaran dan hasil serta pada saat yang sama mengendalikan atas masukan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi

untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non human resources).

a. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Manfaat dari penggunaan basis akrual (a) Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; (b) Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah (c) Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya; (d) Standar yang dapat diterima umum; (e) Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah; (f) Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional.

Implementasi akuntansi berbasis akrual juga dapat membawa dampak pada penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan apabila implementasi tidak dilakukan dengan baik. Penerapan akuntansi berbasis akrual memang tidak mudah sehingga kemungkinan kendala dan hambatan akan terjadi, namun disinilah perlunya persiapan yang matang serta mempersiapkan langkah yang dapat diambil seandainya terjadi kendala dalam pelaksanaan

akuntansi berbasis akrual sehingga tidak berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan.

D. Penelitian Terdahulu

Sulaiman Dan Abdullah (2016), tentang Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linear berganda. Dengan hasil penelitan Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan sampel penelitian pegawai di DPPKA Kota Bengkulu.

Yeni Priatna, Hetika dan Nurul mahmudah (2017), tentang Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Akrual Studi Kasus Di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kota, Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif Dengan hasil penelitan dalam penelitian ini adalah pihak manajemen BLUD RSUD Kardinah telah siap dan telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah terbaru yang dituangkan dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Nyimas Wardatul Afiqoh, Ali Djamhuri dan Lilik purwanti(2018). Tentang Dinamika Penerapan PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Kasus Di Kabupaten Gresik Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis

Prosesual Dengan hasil penelitian Pelaksanaan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan publik yang dalam praktiknya Pemerintah Kabupaten Gresik mengalami beberapa masa sebelum akhirnya masuk dalam tahap implementasi akualisasi Laporan Keuangan Daerah. Masa tersebut yaitu;Pertamamasa toleransi, yang di mana Pemdamedapatkan masa toleransi selama empat tahun(tahun 2010 s.d 2014).

Friska Langelo, David paula elia saerang dan Stanly winylson alexander (2015). Tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Dengan hasil penelitian dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010, tentang SAP pada Pemkot Bitung antara lain, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD, kesiapan perangkat pendukung dalam hal ini SIMDA yang belum teruji untuk penerapan SAP Berbasis Akrual, masih kurangnya Bintek ataupelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi, serta merubahmindsetpejabat penata usahaan keuangan di SKPD yang masih sangat bergantung pada BPKBMD.

Inda franselski sampel, Lintje Kalangi dan Treesje runtu (2015). Tentang Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian

ini adalah Kualitatif Dengan hasil penelitan Kompleksitas laporan keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan pengelola keuangan pemerintah Kota Manado terhadap akuntansipemerintahan berbasis akrual. Laporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya hingga 7 laporan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

EliadaHerwiyanti, Sukirman dan Fairuz Sufi Aziz (2017), tentang Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Dengan hasil penelitan Secara umum, kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerap-kan sistem akuntansi akrual sudah baik karena adanya dukungan dari aspek komunikasi, sumber daya, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan struktur organisasi; dan kedua, Penerapan sistem akuntansi akrual di Itjen Kemenkeu sudah dilakukan dengan sangat memuaskan dan men-dapatkan nilai sebesar 93,40%.

SelvinaSitorus, Lintje Kalangi dan Stanley kho walandouw (2015). Tentang Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon, Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Interpretatif Dengan hasil penelitan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dalam proses persiapan terhadap penerapan SAP berbasis akrual telah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengenalan mulai dari latar belakang perubahan akuntansi kas menuju akrual pada akuntansi berbasis akrual kemudian perbedaan kas menuju akrual dengan kas berbasis akrual sampai kepada penerapan akuntansi berbasis akrual.

Sony Lamonisi (2016). Tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon , Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Dengan hasil penelitan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kota Tomohon mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Ulfi maryanti, Armel yentifa dan Wiwik andriani (2015), tentang Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota) Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif Dengan hasil penelitan Pemerintah Kota Semarang mengimplementasi

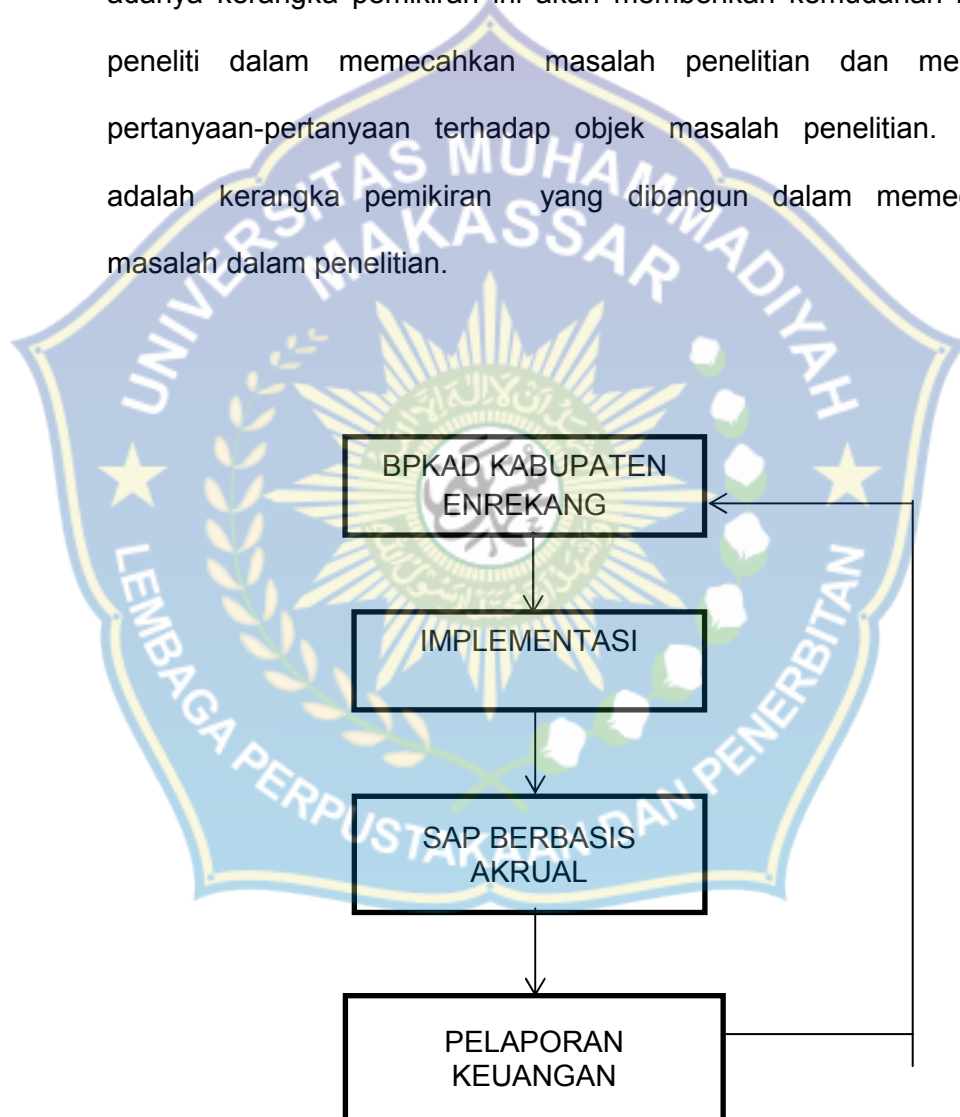
Akuntansi AkruaI sejak tahun 2005. Bagan Akun Standar yang disusun dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Oleh Pemerintah Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan berlaku. Untuk penyusunan Laporan keuangan, Pemerintah Kota Semarang.

Tuti Dharmawati, Intihanah dan Putri Harum Sari Trisila (2018), tentang Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Laporan Operasional BPKAD Kabupaten Konawe, Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, Dengan hasil penelitan menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencatatan, pengakuan, serta pelaporan beban pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Konawe yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu di buat kan suatu

pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual ini secara detail. Dengan telah ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam unsur laporan keuangan yang di sajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di pemerintah. Dengan adanya kerangka pemikiran ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informasi kunci kualitas pelaporanserta mengetahui implementasi basis akrual serta kendala-kendala yang dihadapi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan fokus dan terarah dalam memahami masalah - masalah yang menjadi tujuan penelitian

Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait. Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan fokus penelitian pada Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Enrekang studi kasus

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Fokus penelitiannya yaitu Kualitas Pelaporan.

C. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tahap paling penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini biasa di wilayah tertentu atau suatu lembaga dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di kantor dinas BPKD Kabupaten Enrekang. Dan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2019.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data terdiri dari dua, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada kantor dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang pada dokumen-dokumen dan bukti literatur serta laporan tertulis dari luar yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode:

a. Observasi

Teknik Observasi juga merupakan bentuk pengamatan yang meliputi kegiatan memberikan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan indra. Artinya dilakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dalam hal ini Kantor Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) .

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut informan melalui sesuatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung terhadap informasi utama, Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas BPKD,. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai aspek kualitas pelaporan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencapai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, naskah, rapat, agenda dan sebagainya. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas yang terjadi di Kantor Dinas BPKD, informasi tersebut bisa diperoleh dari dari jurnal, brosur, serta media internal.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sehingga peneliti harus "divalidasi". Validasi adalah suatu tindakan yang dapat membuktikan bahwa suatu proses atau metode dapat memberikan hasil

yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. Validasi terhadap penelitian meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya.

Penelitian kualitatif sebagai instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas temuannya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data tersebut. Langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di kabupaten Enrekang.
2. Mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Enrekang.
3. Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang terbentang di sebelah disebelah utara propinsi Sulawesi Selatan yang pada sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap sebelah timur dengan Kabupaten Luwu. Wilayah yang seluas 75.175 ha terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 129 Desa / Kelurahan. Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah yang beragam. Wilayah bagian Utara merupakan dataran tinggi yang berbukit – bukit dan bergelombang sedangkan wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah. Ketinggian dari permukaan laut bervariasi mulai dari 70 sampai 3000. Kabupaten Enrekang juga dialiri sungai besar dan kecil, seperti sungai saddang, sungai mata allo, sungai mamasa, sungai date, sungai malua, sungai narrang, sungai leon sungai bungin sungai Tallangrilau sungai balabai sungai pasui dan sungai tabang. Hal ini menyebabkan Kabupaten Enrekang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, hutan, padang rumput, dan memungkinkan berkembang nya berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sementara itu keindahan alamnya yang menawan dengan barisan gunung dan perbukitan yang mempesona merupakan salah satu potensi

pariwisata yang telah di kenal oleh wisatawan domestic maupun manca negara. Tidak hanya itu, terindikasinya zona alterasi dan mineralitas yang membawa mineral logam, endapan pasir besi serta bahan galian industri di wilayahnya membuat Kabupaten Enrekang memilikipotensi yang cukup besar di sector pertambangan.Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Otonom yang mempunyai wewenang Otonomi Daerah di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan menyeluruh, pemerintah daerah memandang perlu untuk membentuk suatu badan atau lembaga daerah untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini, Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Dinas Eksekutif Daerah merasa perlu untuk membentuk susunan Organisasi dan tata Kerja dinas-dinas Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi. Hal ini merupakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang baik atas dasar kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah Kantor Dinas Pengelola keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Enrekang, merupakan salah satu Lembaga Daerah Kabupaten Enrekang yang

bertujuan untuk melakukan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah

a. Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang Efektif, Efisiensi, Ekonomis, Transparansi dan Akuntabel untuk Gerakan membangun Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera:

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
- 2) Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya beradabawah dan bertanggung jawab kepada

aBupati Enrekang melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :





Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD Kab. Enrekang

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang dalam kenyataannya mengatur secara jelas dan terperinci mengenai tugas pokok / fungsi jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya agar berhasil, maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok, yaitu sebagai berikut.

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya, menyusun RASK, DASK, RENSTRA, mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah, menganggarkan, menerima pendapatan, membelanjakan, membukukan dan melaporkan setiap transaksi keuangan daerah;

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menatausahakan seluruh kegiatan operasional Badan pengelola Keuangan Daerah dan melaksanakannya;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi dalam lingkungan Badan Pengelola

Keuangan Daerah dan membantu pejabat dalam memperlancar kegiatannya;

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan pengembangan BPKD dan merencanakan Anggaran BPKD, membelanjakan, membukukan dan melaporkan dana yang digunakan serta melaporkan kegiatannya.

e. Bidang Penerimaan

Kepala Bidang Penerimaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan seluruh penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Sub Bidang Pajak dan Retribusi

Kepala Sub Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Sub Bidang Dana Perimbangan

Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas membantu setiap Unit Kerja, menyusun anggaran program / kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus dan melakukan penerimaan atas Dana Perimbangan dan Penerimaan lainnya.

h. Bidang Pengeluaran

Kepala Bidang Pengeluaran mempunyai tugas pokok menyetujui pengeluaran yang telah diverifikasi dan di otorisasi oleh pejabat yang

berwenang, menggabungkan RASK, DASK Unit Kerja, menyusun konsep RAPBD dan Nota Keuangan serta Perubahan APBD.

i. Sub Bidang Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan pembayaran, mencatat dan melaporkan setiap pengeluaran yang telah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

j. Sub Bidang Anggaran

Kepala Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyampaikan arah dan kebijakan umum APBD kepada setiap satuan kerja, mengkoordinasikan penyusunan RASK dan perubahannya oleh tim anggaran eksekutif, mempersiapkan RAPBD dan melakukan revisi APBD sesuai persetujuan DPRD serta menyusun DASK;

k. Bidang Akuntansi dan Verifikasi

Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi setiap penerimaan dan pengeluaran, membukukan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD;

l. Sub Bidang Akuntansi

Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah diotorisasi dengan menggunakan sistem pembukuan sesuai ketentuan dan membuat laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD dalam satu tahun anggaran;

m. Sub Bidang Verifikasi

Kepala Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok memverifikasi penerimaan dan pengeluaran unit kerja sesuai DASK dan ketentuan yang berlaku.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kajian dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub ini akan di sajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang di pilih, informan tersebut adalah Kepala dinas dan bagian akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka hasil penelitian ini dapat diuraikan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang dalam aspek kualitas pelaporan. Dan kendala yang di hadapi dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

1. Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah harus menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2016. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut,

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bapak Drs. Ulung Tiro.R.MM yang menyatakan bahwa:

"BPKD ini mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2016 sampai sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah, mengingat bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan hal baru maka pegawai kami mengalami banyak kesulitan dalam pelaporannya" Menurut KSAP (2010), pada tahun 2010 telah diadakan sosialisasi mengenai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, Pada tahun 2012 penyiapan peraturan pelaksanaan, kebijakan akuntansi dan sistemnya sudah harus ada serta sosialisasi lanjutan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2013 dilakukan capacity building atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sosialisasi dan pelatihan serta dilakukan lanjutan pengembangan sistem kemudian pada tahun 2014 implementasi percobaan sistem di beberapa pemerintah daerah telah dilakukan. Pada tahun 2015 dilakukan implementasi paralel akuntansi akrual dan akuntansi kas menuju akrual untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hingga penerapan basis akrual penuh pada tahun 2016.

Hasil yang akurat dan terpercaya dalam pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrual harus didukung oleh berbagai pihak terutama sumber daya manusianya, dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual ada beberapa kendala yang terjadi, seperti yang diungkapkan staf bagian Akuntansi yang menyatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi pada saat itu yaitu soal pemahaman, belum bisa full memahami sistem tersebut. Kemudian persoalan SDM-nya juga menjadi kendala karena masih sebagian kecil saja yang memahami teknis sistem tersebut pada saat itu, tetapi alhamdulillah sampai saat ini berkat kerja keras pegawai, kami dan seluruh masyarakat dapat menikmati manfaatnya seperti Laporan keuangan yang diperoleh akan lebih akuntabel karena setiap transaksinya tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan, gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintahan, lebih komprehensif dalam penyajian informasinya. Dengan pelaporan berbasis akrual, penggunaan dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

Akuntansi berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Sesuai yang diungkapkan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bapak Drs. Ulung Tiro.R.MM yang menyatakan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dengan berpedoman pada standar lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan substansi yang berperan penting dalam kepuasan publik atas pengelolaan keuangan di kantor ini. Pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas membutuhkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepuasan publik, aparaturnya instansi ini harus memperhatikan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan.

Manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengemukakan bahwa adanya hubungan yang

kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dari wacana-wacana dan dipertegas oleh teori di atas dapat diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang telah mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut dengan mengikuti sosialisasi atau pelatihan sehingga kualitas pelaporan pemerintahan dapat terlihat/terukur dari hasil atau manfaat yang telah didapatkan selama menggunakan sistem tersebut. Sementara tujuan pemerintah menerapkan sistem akrual yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang sudah mengimplementasikan sesuai dengan tujuan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah harus menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 dan seterusnya. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.

Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambaranya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis atau komponen laporan keuangan. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus atau defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitaskekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh staf bagian Akuntansi Ibu Ama yang menyatakan bahwa:

“Akuntansi berbasis akrual lebih dipercaya dan akurat dalam menghasilkan informasi yang akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Pencatata seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, dan dapat juga mengukur kinerja, basis akrual

menyediakan informasi penggunaan sumber daya ekonomi sebenarnya.

2. Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Antara Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual

Tabel 5.1
Komponen Laporan Keuangan Antara Basis Kas Menuju Akrual Dan Basis Akrual

Komponen Laporan Keuangan Basis Kas Menuju Akrual	Komponen Laporan Keuangan Berbasis Akrual
1. Laporan realisasi anggaran (LRA)	1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Neraca	2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
3. Laporan Arus Kas (LAK)	3. Neraca
4. Catatan atas laporan keuangan (CLAK)	4. Laporan operasional
	5. Laporan arus kas
	6. Laporan perubahan ekuitas
	7. Catatan atas laporan keuangan

Akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan harus menyajikan informasi tentang perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2015-2016. Laporan keuangan BPKD antara lain terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Unsur-unsur LRA dalam basis akrual:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
5. Neracayang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal dan periode tertentu. Unsur neraca dalam basis akrual adalah:
 - a. Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- c. Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
7. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

- b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
8. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Sistem akuntansi berbasis akrual juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Tabel 5.2
Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2018

URAIAN	Saldo 2017	Saldo 2018	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan	1.958.243.560	2.203.094.096	239.388.344	12,2
Beban tambahan penghasilan PNS	106.590.000	108.855.000	2.265.000	2,12
Beban uang lembur PNS	237.532.000	217.375.000	(20.157.000-)	(8,49)
Beban uang lembur non PNS	-	1.380.000	1.380.000	-
Beban honor bulanan	35.700.000	44.800.000	9.100.000	35,49
Beban Honorium pegawai honor	-	34.650.000	34.650.000	-
JUMLAH	2.338.065.560	2.610.154.096	272.088.536	11,63

Sumber: Data sekunder yang di dapatkan

Sesuai dengan tabel dapat diketahui bahwa kualitas kerja pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang meningkat dari tahun 2017 sampai 2018 dengan rincian beban pegawai pada tahun 2017 menggunakan anggaran Rp. 2.338.065.560 sedangkan pada tahun 2018 menggunakan anggaran 2.610.154.096, sesuai yang di ungkapkan oleh Kepala Bidang Akuntansi Muhludin. SE, MM yaitu:

Antusias pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dalam mengimplementasikan standar Akuntansi pemerintah

berbasis akrual itu sudah sangat tinggi melihat anggaran yang digunakan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 itu meningkat, kenapa anggaran yang di gunakan sangat tinggi karena kita ketahui bahwa sistem akuntansi berbasis akrual bisa dikatakan rumit jadi butuh dana-dana seperti dana lembur dan lain – lain.

3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2018.

Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.407.818.499 terdiri dari :

Tabel 5.3
Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2018.

URAIAN	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
Gaji Pokok PNS	Rp 1.674.250.662	-
Tunjangan Keluarga	Rp 127.564.568	-
Tunjangan Jabatan	Rp 192.648.750	-
Tunjangan Umum	Rp 55.247.500	-
Tunjangan Beras	Rp 95.100.320	-
Tunjangan PPh	Rp 35.493.835	-
Pembulatan Gaji	Rp 26.647	-
Belanja Pegawai	-	Rp 793.835.000
Belanja Barang/Jasa	-	Rp 2.994.061.215
Belanja Modal	-	Rp 314.190.000
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 125.400.000	
JUMLAH	Rp.2.305.732.284	Rp.4.102.086.215

Sumber: Data Sekunder

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang melaksanakan Program yang berkaitan dengan kinerja pegawai sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata persuratan perkantoran secara umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.422.628.415,- terealisasi sebesar Rp. 407.581.269,- (96,43%). Anggaran tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 68.422.365,- realisasi sebesar Rp. 55.137.234,- (80,58%). Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai layanan jasa komunikasi telepon dan layanan jasa penerangan listrik kantor.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.55.419.500,- realisasi sebesar Rp.55.399.500,- (99,96%), Kegiatan ini bertujuan melaksanakan pengadministrasian keuangan kantor, antara lain penganggaran, pengelolaan, pencairan, penyimpanan, pengendalian, dan pemeriksaan keuangan secara tertib dan akuntabel.
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi sebesar Rp.4.999.400,- (99,99%). Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi penggantian alat-alat listrik dan peralatan elektronik kantor.

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.7.509.000,- realisasi sebesar Rp.6.232.842,- (83%). Kegiatan ini diperuntukkan untuk pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.8.800.000,- realisasi sebesar Rp.8.440.000,- (95,91%). Dengan demikian tersedia bahan bacaan yang akan meningkatkan pengetahuan pegawai dan sarana publikasi yang memadai dalam penyampaian informasi. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.180.396.000,- realisasi sebesar Rp.180.304.243,- (99,95%). Kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam daerah/tingkat kabupaten (dataran rendah & dataran tinggi) dan luar daerah di tingkat provinsi dan luar provinsi, dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi program pembangunan daerah.
6. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.97.081.550,- realisasi sebesar Rp.97.068.050,- (99,99%) Kegiatan ini meliputi Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan Pelaksanaan jasa persuratan kantor (pembuatan, penerimaan, dan pendistribusian).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.327.000,-

terrealisasi sebesar Rp.232.044.440,- (96,00%). Anggaran tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi sebesar Rp. 41.234.000,- (82,47%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebanyak 2 (dua) unit.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.67.190.000,- realisasi sebesar Rp.67.188.000,- (99,99%). Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal, sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Cabinet)
 - b. Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Gordyn, Sekat Ruangan)
 - c. Pengadaan Alat Pendingin (Air Conditioner)
 - d. Pengadaan Komputer (Komputer PC)
 - e. Pengadaan Peralatan Personil Komputer (Printer, Hard Disk Eksternal)
 - f. Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon III dan Eselon IV
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran sebesar Rp.106.687.000,- realisasi sebesar Rp.105.172.440,- (98,58%). Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Layanan jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.450.000,- realisasi sebesar Rp.18.450.000,- (100%). Kegiatan ini ditujukan untuk perbaikan/service (AC,

komputer, printer), penggantian kompresor, penggantian spare part monitor/CPU komputer sehingga peralatan kantor dapat terus terpelihara dengan baik.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja Aparatur, dengan alokasi anggaran Rp.53.250.000,- terealisasi sebesar Rp.53.250.000,- (100%). Anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.750.000,- realisasi sebesar Rp.24.750.000,- (100%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi pegawai BPKD.
2. Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.28.500.000,- realisasi sebesar Rp.28.500.000,- (100%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah pengadaan Pakaian Olahraga bagi pegawai BPKD.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dengan alokasi anggaran Rp.279.655.250,- realisasi sebesar Rp.279.584.250,- (99,97%). Anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan jumlah anggaran sebesar Rp.104.655.250,- realisasi sebesar Rp.104.654.350,- (99,99%).

Pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas dan kontribusi biaya pendidikan bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang untuk mengikuti diklat, sosialisasi, pelatihan, seminar, bimtek, dan lain sebagainya dalam rangka pengembangan kapasitasnya.

2. Studi Pemahaman Perencanaan dan Penganggaran dengan jumlah anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi sebesar Rp.174.929.900,- (99,96%). Pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas dalam rangka studi pemahaman perencanaan dan penganggaran.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran Rp.23.911.040,- terealisasi sebesar Rp.23.911.000,- (100%). Anggaran tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu: Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp.33.019.200,- realisasi sebesar Rp.32.907.000,- (99,66%). Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Semester Awal dan Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Semester Akhir tahun 2018, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sesuai yang diungkapkan oleh Staf Akuntansi Ibu Ama yaitu:

“iya dari lima program yang telah dilakukan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dari program yang telah dilaksanakan kita dapat mengetahui kualitas laporan keuangan yang telah disajikan, yang dimana program tersebut Alhamdulillah berjalan dengan efektif dan efisien dari tahun 2018 dalam meningkatkan kualitas pelaporan selama menggunakan sistem akrual tersebut, iya Alhamdulillah sampai sekarang manfaatnya sudah bisa dirasakan sampai sekarang”.

Dari penjelasan diatas mengenai tentang Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2018 membuktikan bahwa tingkat kualitas pelaporan pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang itu meningkat tahun 2018, sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Akuntansi Mahluddin. SE,MM yaitu:

“untuk mengetahui standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan harus memperhatikan pencapaian ikhtisar realisasi target kinerja keuangan pada instansi tersebut dan hasilnya meningkat tahun 2018 dan harus memperhatikan program-program yang dilaksanakan yang berkaitan dengan kualitas kerja pemerintahan seperti, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, apakah dari program-program tersebut sudah berjalan secara efektif atau efisien, kita ketahui bersama bahwa bahwa ada empat karakteristik dalam kualitas laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan”.

Dari pembahasan diatas dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Enrekang Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang di lihat dari Perbandingan Komponen laporan keuangan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual dan rincian-rincian anggaran dan pelaporan yang telah dilaksanakan begitupun dengan program-program yang terlaksana sudah

mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

pelaporan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang telah antusias mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam aspek kualitas pelaporan pemerintahan sebagaimana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem ini. Standar akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang sudah berjalan secara efektif dan efisien dilihat dari program-program yang telah dijalankannya yang berkaitan dengan masalah kepegawaian sudah berjalan sebagai mana mestinya dari tahun 2017 sampai pada tahun 2018 yang dimana program tersebut terdiri dari yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai upaya perbaikan dari kelemahan yang telah ditemukan sebagai berikut : (1) Diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam mengimplementasikan standar akuntansi basis akrual. (2) Masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staf bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang akan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. (3) Harus sering melakukan sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan training atau pelatihan – pelatihan yang berkaitan dengan sistem akuntansi berbasis akrual agar pengimplementasian lebih efektif dan efisien. (5) Masih perlu dilakukan pengkajian kondisi SDM pemerintahan yang ada di pemerintah daerah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang yang melakukan pengelolaan keuangan. (6) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang harus lebih menyiapkan SDM yang berintegritas tinggi dan akuntabel. (7) Tingkat dan latar belakang pendidikan SDM sebaiknya dari akuntansi, minimal strata 1 (S1).

Daftar Pustaka

- Abdul H, Tanjung. (2013). *Akuntansi pemerintah berbasis akrual pendekatan teknis sesuai pp no. 71/2010*. Bandung: Alfabeta
- Budiono, A (2016), *Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2015*, Tesis, Jakarta, STIA LAN.
- Firdaus, dahlia., suyoga D. S. and latifah. Sri W.(2015). Evaluasi penerapan PP No 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual: studi kasus di Pemda Nganjuk. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol 16 No.1 Januari 2015.
- Friska Langelo, saerang, D.P.E.& Stanly wnylson alexander (2015)*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 1-8.ISSN 2303-1174
- Herwiyanti, E., Sukirman dan Aziz, F.Z. (2017), *Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan* *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 19, No 1 Mei 2017 hal 13-23 ISSN 1441-0288 (print)/ ISSN 2338-8137 (online).
- Indara, F.S., Kalangi, L. &runtu, T. (2015) *Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual*. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1 (Maret 2015), Hal 621-630,ISSN 2303-1174.
- Kementerian/Lembaga*”, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.Vol. 14No.1 Tahun 2016, hal. 1-15.
- Kusuma dan Yudha, M.I,“*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah*”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2013, hal. 5-20.
- Laughlin, R. (2012). *Debate: Accrual Accounting: Information For Accountability Or Decision Usefulness?* *Public Money & Management*.
- Margareta dan Ayu, W.“*Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 9 Tahun 2015, hal. 1-5.
- Mahsun, Mohamad, & Sulistyowati F., and Purwanugraha Heribertus Andre. 2013. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.

- Nyimas, W.A., Djamhuri,A.& Purwanti,L. (2018)*Dinamika Penerapan Pp-71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Kasus Di Kabupaten Gresik*Jurnal Bisnis & Manajemen Vol.5 No.1, (Januari 2018) Hal 102-117, ISSN:1829-7528.
- Najati, Ida, 2016.“*Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*”
- Noviyanti, &Aminah,M.“*Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Dan Pengalaman Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Vol. 3 No. 1 Tahun 2015, hal. 21-41.
- Rosmery E. Dadang S. dan Umuh M. (2016) *Dasar- Dasar Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah*Cetakan Pertama Bogor.
- Ritonga, I. (2013). *Akuntansi pemerintahan daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
- Selvina,S., Kalangi,L. &walandouw,S.K. (2015)*Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*.Jurnal EMBA Vol.3 No.1(Maret 2015), Hal 941-949, ISSN 2303-1174.
- Supomo, Bambang dan Indriantoro,N. *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*, Edisi Pertama, (BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta, 2013),
- Sony Lamonisi (2016) *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal 223-230,ISSN 2303-1174.
- Sulaiman & Abdullah (2016)*Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrua*. Jurnal EMBA Vol.4 No.2(Oktober 2016), Hal. 83-100, ISSN: 2339-2886
- Sulaeman, Hamid,A., & Yunus,M.“*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bireuen*”, Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No 4 Tahun 2015, hal. 112-121.
- Tuti, D.,Intihanah&Trisila, P.H.S. (2018)*Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Laporan Operasional BPKAD Kabupaten*

Konawe Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.III/1/Februari 2018
ISSN(Online):2503-1635

Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Ulfi,M., yentifa, A.& Andriani,W. (2015) *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung)* Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 10.No.2 Desember 2015. Hal.1-10,ISSN 1858-3687.

Yeni,P.,Hetika & mahmudah,N. (2017) *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Akrual: (Studi Kasus Di Badan Layanan Umum Daerah Rsud Kardinah Kota Tegal)* Jurnal AKSI Vol 1 (2017)ISSN : 2528-6145



L

M

M

P

I

R

M

N



RIWAYAT HIDUP



IRWAN dilahirkan di surakan Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada Tanggal 26 Januari 1996. Penulis merupakan anak ke tujuh dari delapan bersaudara buah kasih sayang pasangan Radeng dan Pette.

Penulis mulai pendidikan di bangku SD 47 Surakan selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Enrekang dan pendidikan atas di SMA Negeri 1 Cendana kemudian pindah ke SMA Muhammadiyah Enrekang.

Pada tahun 2014, penulis masuk di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Program Studi Strata Satu(SI)

Berkat rahmat Allah Subhanahuwataala dan iringan doa dari seluruh keluarga, dan semua sahabat, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi ini dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul : *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Enrekang (studi kasus badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang)*. Untuk menghubungi penulis dapat melalui email

irwanradeng@gmail.com

TRANSKIP WAWANCARA

Biodata Informan

Nama	Drs. Ulung Tiro. R, MM
Usia	50 Tahun
Jabatan/Pekerjaan	Kepala Dinas BPKD
Hari, Tanggal dan Bulan	Selasa, 7 Mei 2019
Pukul	10.00 – selesai
Kategori	Informasi Kunci

Biodata Peneliti

Nama	Irwan
Usia	23 Tahun
Jabatan/Pekerjaan	Mahasiswa
Hari, Tanggal dan Bulan	Selasa, 7 Mei 2019
Pukul	10.00 – selesai



Hasil Wawancara

Irwan :Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu Pak Ulung Tiro?

Ulung Tiro :Iye nak Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatu.

Irwan :Saya seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar pak. Sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktu kerja bapak dan saya sangat berterima kasih karena telah diperkenankan untuk melakukan penelitian di tempat ini yakni standar akuntansi berbasis akrual.

Ulung Tiro :oh iya nak apakah ada yang saya bisa bantu

Irwan :terima kasih pak kesempatannya apakah saya bisa mewawancarai bapak?

Ulung Tiro :ohh silahkan nak

Irwan :berkaitan dengan topik penelitian saya yakni “standar akuntansi pemerintah berbasis akrual” pertama tama yang ingin saya tanyakan bagaimana sejarah perkembangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah?

Ulung Tiro :sejarah perkembangan BPKD ini nak sudah berpuluh puluh tahun Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Otonom yang mempunyai wewenang Otonomi Daerah di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah yang luas dan menyeluruh, pemerintah daerah memandang perlu untuk membentuk suatu badan atau lembaga daerah untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini, Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Dinas Eksekutif Daerah merasa perlu untuk membentuk susunan Organisasi dan tata Kerja dinas-dinas Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Irwan :oh iye pak selanjutnya saya ingin bertanya mengenai struktu organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah apakah struktur organisasi telah di rancang dan disusun dengan baik? Sesuai dengan bidangnya masing – masing?

Ulung Tiro :iye nak , struktur organisasi pada dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini telah di susun sebaik mungkin dan sesuai dengan bidangnya masing – masing misalnya bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi setiap penerimaan dan pengeluaran, membukukan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD.

Irwan :oh iya pak, selanjutnya saya yang ingin tanyakan mengenai sejak kapan implementasi SAP berbasis akrual di kantor BPKD Pak?

Ulung Tiro :BPKD ini mulai mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2016 sampai sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah. “Pada tahun 2012 penyiapan peraturan pelaksanaan, kebijakan akuntansi dan sistemnya sudah harus ada serta sosialisasi lanjutan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2013 dilakukan capacity building atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sosialisasi dan pelatihan serta dilakukan lanjutan pengembangan sistem kemudian pada tahun 2014 implementasi percobaan sistem di beberapa pemerintah daerah telah dilakukan. Pada tahun 2015 dilakukan implementasi paralel akuntansi akrual dan akuntansi kas menuju akrual untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hingga penerapan basis akrual penuh pada tahun 2016.

Irwan :ohh iya pak, Untuk Mengelola keuangan apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Pak?

Ulung Tiro : iya nak tapi untuk memperoleh informasi itu silahkan dapatkan di bagian pegawai bidang Akuntansi karena segala pelaporan keuangan ada di bagian itu seperti lampiran, dokumen pendukung seperti catatan atas bukti transaksi yang terjadi.



Dokumentasi

